



## JURNAL KRAKATAU INDONESIAN OF MULTIDISCIPLINARY JOURNALS

<http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/krakatau/index>

E ISSN: 3025-7085

### DAMPAK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR: STUDI KASUS EMBUNG POTORONO

Ussi Aminati<sup>1</sup>, Alya Sekar Wijayati<sup>2</sup>, Salis Kurnia Faizah<sup>3</sup>, Revalena Fatma Aulia<sup>4</sup>, Suyatno<sup>5</sup>,  
Muhamad Sukarno<sup>6</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.

Corresponding Email: ussiwizard@gmail.com

#### ABSTRACT

*This study analyses the impact of local government investment on the welfare of the surrounding community through a case study of Embung Potorono in Kalurahan Potorono, Bantul Regency, Daerah Istimewa Yogyakarta, using a descriptive quantitative approach with questionnaire data (20 MSME respondents), interviews with BUMDes and Pokdarwis managers, and a study of financial reports showing that the multifunctional reservoir (water conservation, fish farming, tourism) generates an income of IDR 1.5 billion/year; absorbs 20 workers, increases the activity of 40 MSMEs, with 70% of respondents agreeing positively on income, 100% on employment, and social welfare, through collaborative management that contributes IDR 65 million/year to the village revenue (PADes) despite being constrained by independent funding without HTM. therefore, e-ticketing and CSR are recommended for the sustainability of replication in 100 reservoirs in DIY.*

**Keywords:** Potorono Reservoir, regional investment, community welfare, BUMDes, collaborative

#### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak investasi pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar melalui studi kasus Embung Potorono di Kalurahan Potorono, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data kuesioner (20 responden UMKM), wawancara pengelola BUMDes dan Pokdarwis, serta studi dokumen laporan keuangan yang menunjukkan embung multifungsi (konservasi air, budidaya ikan, wisata) menghasilkan pendapatan Rp1,5 miliar/tahun, menyerap 20 tenaga kerja, meningkatkan aktivitas 40 UMKM dengan 70% responden setuju positif pada pendapatan, 100% pada lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial, melalui pengelolaan kolaboratif yang berkontribusi PADes Rp65 juta/tahun meski terkendala pendanaan mandiri tanpa HTM, sehingga direkomendasikan e-ticketing dan CSR untuk keberlanjutan replikasi di 100 embung DIY.

**Kata Kunci:** Embung Potorono, investasi daerah, kesejahteraan masyarakat, BUMDes, pengelolaan kolaboratif.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem (Jenahu et al., 2023). Di seluruh dunia, embung dan telaga yang beroperasi secara lokal bukan hanya berperan sebagai tempat penyimpanan air untuk menjaga ketahanan lingkungan, khususnya pada periode kering, tetapi juga berevolusi menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dan pengelolaan wisata yang berorientasi pada komunitas. Fenomena tersebut tercermin pada pengelolaan embung di tingkat desa, di mana embung merupakan salah satu sarana penampungan air yang digunakan oleh masyarakat desa sebagai pengairan dan sumber air bersih bagi masyarakat, namun juga memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan dengan baik sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat (Istiqomawati et al., 2023). Penggunaan infrastruktur lingkungan yang berfungsi ganda dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan keseimbangan ekosistem. Agar fungsi ganda tersebut berjalan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci, sebagaimana dinyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hijau menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Hanifah et al., 2025).

Pada tingkat nasional hingga desa, Pemerintah Indonesia mendukung pembangunan embung dan pengelolaan air bersih sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air dan penguatan ketahanan lingkungan, sekaligus sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat desa. Pembangunan embung yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, antara lain dalam mendukung sektor perikanan dan pariwisata desa, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Saputra, 2020; Nawangsih et al., 2022; Azlan, 2024). Namun, keberhasilan penggunaan embung tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fisik pembangunan, tetapi juga sangat tergantung pada sistem manajemen lembaga, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan dalam pendanaan pengelolaan. Pengembangan embung tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang terencana, partisipasi masyarakat, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar embung dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Al-Qadhri et al. 2025).

Dalam lingkungan setempat, Telaga Potorono di Kecamatan Potorono adalah salah satu danau buatan yang dikembangkan tidak hanya untuk menyimpan air, tetapi juga sebagai destinasi wisata di desa. Keberadaan Telaga Potorono menunjukkan penerapan kebijakan pembangunan danau multifungsi di level desa. Namun demikian, pengelolaan danau wisata di tingkat lokal masih mengalami sejumlah tantangan, terutama dalam hal pengelolaan organisasi, keterlibatan masyarakat, dan sistem pendanaan mandiri yang mendukung kelangsungan pengelolaannya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pengelolaan Embung Berbasis Masyarakat

| No | Penulis dan Tahun                   | Judul Artikel   | Fokus Penelitian   | Metode Penelitian  | Lokasi/ Konteks  | Hasil Utama   | Keterbatasan Penelitian  |
|----|-------------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| 1. | Fahmi Maulana Ikhsan (2024)         | Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono di Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi DIY | Collaborative Governance dalam pengelolaan objek wisata Embung Potorono                            | Kualitatif deskriptif ; teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi , dokumentasi; analisis dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan | Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY | Collaborative Governance berjalan cukup maksimal dengan indikator Ansell & Gash; Pokdarwises berperan penting | Trust Building belum optimal; informasi terbatas; minim data kuantitatif ; fokus pada proses bukan dampak ekonomi/lingkungan |
| 2. | Astuti Naviah Apriliani dkk. (2021) |   | Pengembangan wisata Embung Gunung Panggung terintegrasi Desa Budaya untuk kesejahteraan masyarakat | Kualitatif deskriptif ; purposive sampling ; data melalui observasi , wawancara  | Desa Tambakromo, Kecamatan Ponjong , Kabupaten Gunung            | Pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap (penyadaran, pelatihan, gotong royong, kegiatan                       | Kesadaran masyarakat rendah; fasilitas belum memadai; keterbatasan lahan; kegiatan budaya                                    |

| No | Penulis dan Tahun                        | Judul Artikel  | Fokus Penelitian  | Metode Penelitian  | Lokasi/ Konteks                                    | Hasil Utama  | Keterbatasan Penelitian  |
|----|--|--|---|--|--|--|--|
|    |  |  |   | ra, angket, studi pustaka  | kidul, DIY   | rutin); Pokdarwises berperan penting; fasilitas mulai dibangun   | belum rutin; minim data kuantitatif ; peran swasta belum dibahas                                       |
| 3. | Widiastuti , Yunianto & Rahmawati (2022) | Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono                        | Evaluasi tata kelola keuangan dan sistem akuntansi BUMDes | Deskriptif kualitatif; studi kasus; FGD, wawancara, observasi, dokumentasi | BUMDes Mekaring Pono Potorono, Bantul, DIY         | Belum ada kebijakan akuntansi; pencatatan masih sederhana ; rekomendasi perlunya standar dokumen transaksi dan sistem akuntansi unit usaha | Data terbatas pada satu BUMDes; software akuntansi belum diimplementasikan karena kesiapan data rendah |
| 4  | Karina, Ruspianda & Afrizal (2025)       | Dampak Objek Wisata Embung wisata terhadap pendapatan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat | Dampak embung wisata terhadap pendapatan masyarakat       | Kualitatif ; wawancara, observasi, dokumentasi                             | Desa Sukaraja, Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi | Pendapatan pelaku usaha naik 74%; membuka kesempatan kerja; peluang usaha baru muncul  | Analisis hanya pada satu desa; data kuantitatif terbatas; generalisasi rendah.                         |

| No | Penulis dan Tahun        | Judul Artikel   | Fokus Penelitian  | Metode Penelitian                                     | Lokasi/ Konteks  | Hasil Utama   | Keterbatasan Penelitian  |
|----|--------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 5  | Abdillah & Muslim (2024) | Pengaruh Wisata Embung Terhadap Pendapatan Masyarakat dengan Lapangan Kerja sebagai Variabel Mediasi di Kenagarian Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman | Pengaruh wisata embung terhadap pendapatan masyarakat dengan mediasi lapangan kerja | Kuantitatif; kuesioner (32 KK); SEM-PLS (Smart PLS 4) | Wisata Embung Tabek Gadang, Kenagarian Toboh Gadang, Padang Pariaman | Objek wisata, promosi, dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan; lapangan kerja tidak signifikan sebagai variabel mediasi | Sampel kecil (32 KK); lokasi wisata masih tahap pembangunan; hasil belum bisa digeneralisasi |

| No | Penulis dan Tahun      | Judul Artikel   | Fokus Penelitian  | Metode Penelitian   | Lokasi/ Konteks                                       | Hasil Utama   | Keterbatasan Penelitian   |
|----|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | Abimanyu & Anna (2024) | Analisis Keberadaan Embung Doho di Desa Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri terhadap Aspek Perubahan Penggunaan Lahan, Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi Tahun 2019 dan 2023 | Dampak embung terhadap perubahan lahan, sosial, dan ekonomi | Survei; purposive sampling ; analisis deskriptif kualitatif; data primer & sekunder | Embung Doho, Desa Doho, Kecamatan Girimarto, Wonogiri | Lahan kosong jadi embung (1,5 ha) & hortikultura (1,15 ha); produksi pertanian naik dari Rp2,4 miliar (2019) ke Rp4,8 miliar (2023); gotong royong meningkat; pendidikan membaik (lulusan SMA & sarjana naik signifikan ) | Fokus hanya pada satu desa; analisis deskriptif tanpa generalisasi; data terbatas periode 2019–2023 |

| No | Penulis dan Tahun            | Judul Artikel  | Fokus Penelitian  | Metode Penelitian   | Lokasi/ Konteks                                     | Hasil Utama  | Keterbatasan Penelitian  |
|----|------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 7  | Lastiantoro & Cahyono (2023) | Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Embung Bowong Tlogosari, Giritontro, Wonogiri | Persepsi & partisipasi masyarakat terhadap pelestarian embung | Kuantitatif & kualitatif; wawancara terstruktur (40 responden), survei, observasi, dokumentasi; analisis Likert & tangga partisipasi Arnstein | Embung Bowong, Desa Tlogosari, Giritontro, Wonogiri | Persepsi masyarakat baik; partisipasi masih rendah (kategori manipulasi) | Partisipasi masyarakat belum optimal; penelitian terbatas pada 40 responden di satu embung |

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pengelolaan infrastruktur pariwisata dan ekonomi lokal dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat jika didukung dengan sistem pengelolaan yang efektif serta keterlibatan masyarakat. Studi tentang tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan embung menekankan pentingnya kontribusi aktor lokal dalam memastikan kelangsungan pengelolaan (Ihsan, 2024; Apriliani dkk. , 2021). Penelitian mengenai persepsi serta keterlibatan masyarakat juga menunjukkan bahwa meski pandangan masyarakat terhadap keberadaan embung cenderung positif, tingkat partisipasi mereka dalam upaya pelestarian masih terbilang rendah (Lastiantoro and Cahyono, 2023). Di sisi lain, kajian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih berorientasi pada aspek manajemen keuangan internal tanpa menghubungkannya dengan pengelolaan embung sebagai aset lingkungan desa yang produktif (Widiastuti dkk. , 2022). Sementara itu, penelitian mengenai dampak embung terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pendapatan serta kesejahteraan, namun belum mengeksplorasi secara mendalam mekanisme pengelolaan operasional, skema pendanaan mandiri, serta integrasi fungsi lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan dalam kelolaannya (Karina dkk. , 2025; Abdillah and Muslim, 2024; Abimanyu and Anna, 2024). Oleh karena itu, riset yang secara khusus membahas pengelolaan embung sebagai aset lingkungan desa yang dikelola oleh masyarakat melalui peran BUMDes, dengan penekanan pada pengelolaan operasional,

pendanaan mandiri, dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, masih tergolong jarang. Penelitian ini hadir untuk menutup kekurangan tersebut melalui analisis pengelolaan Telaga Potorono sebagai embung multifungsi yang dikelola secara kolaboratif oleh BUMDes dan masyarakat dengan model pendanaan mandiri yang berkelanjutan.

Meskipun sudah ada banyak kebijakan dan penelitian yang menekankan pentingnya pengelolaan embung yang melibatkan masyarakat dan lembaga lokal, masih ada banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan embung di level desa. Beberapa penelitian lebih menekankan pada peran lembaga yang mengelola embung untuk pariwisata, tetapi studi yang secara rinci mengulas sistem manajemen, pola partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pendanaan dalam konteks pengelolaan embung desa masih sangat terbatas. Situasi ini menunjukkan perbedaan antara konsep pengelolaan embung berkelanjutan yang sering dibahas dalam literatur dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis bagaimana tata kelola Telaga Potorono dikelola secara berbasis masyarakat oleh BUMDes, terutama dalam hal kelembagaan, pendanaan mandiri, dan dampaknya bagi pemberdayaan ekonomi di desa. Kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan embung yang melibatkan masyarakat dan juga memberi masukan praktis bagi pemerintah desa serta lembaga pengelola untuk mengoptimalkan fungsi embung secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat dampak investasi pemerintahdaerah ( pembangunan Embung Potorono) terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

### **2. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di **Embung Potorono**, Kalurahan Potorono, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian adalah **pengelolaan Embung Potorono**, yang dipilih secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan embung.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- **Kuesioner:** Digunakan sebagai sumber data utama untuk mengukur dampak pembangunan Embung terhadap pendapatan, aktivitas usaha, kesempatan kerja, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- **Wawancara** : Dilakukan sebagai data pendukung dengan pihak:pihak terkait, seperti pengelola Embung atau pengelola BUMDes, guna memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dan manfaat embung, serta dampak investasi
  - **Studi Dokumen** : Teknik pengumpulan data yang dimana untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan pengelolaan Embung Potorono. Studi dokumen ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan sejarah pembangunan, sumber investasi, sistem pengelolaan, serta alokasi dan pelaporan keuangan embung.
- .

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah:

- **Kuesioner** yaitu angket yang berisi pernyataan-pernyataan dan dijawab oleh responden berdasarkan tingkat persetujuan mereka
  - **Alat perekam dan catatan lapangan** yang digunakan untuk merekam hasil wawancara dan mencatat temuan penting selama proses penelitian berlangsung.
  - Pedoman wawancara yaitu data tertulis yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian
- .

#### 5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan:

1. **Statisti Deskriptif:** Nilai rata-rata dari hasil kuesioner untuk menggambarkan kondisi dan persepsi responden. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif dan digunakan sebagai penguatan serta pelengkap dalam menjelaskan hasil analisis kuantitatif

#### 6. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen pendukung yang diperoleh. Serta dilakukan pengecekan ulang hasil dari wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi dilapangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Embung Potorono menunjukkan model hybrid kolaboratif antara Pemerintah Desa Potorono, BUMDes, dan Pokdarwis, yang terbentuk sejak pembangunan 2015-2016 oleh DLH Provinsi DIY pada tanah kas desa untuk konservasi air, budidaya ikan (panen tahunan 10 dukuh), dan wisata. Data primer dari wawancara (Penasihat Lurah Prawata Sap, Direktur BUMDes M. Tamzis, Ketua Pengurus Bahron) serta sekunder (laporan keuangan Juli-September 2025) mengungkap struktur organisasi dengan pengurus inti (Bahron-Ketua, Dzaky Salahuddin-Sekretaris, Roy

Nurcahyo-Bendahara) dan koordinator operasional (Sumarjana-operator, Sugiyanto-parkir, Supri Yanto-keamanan, Rohmadi-kebersihan, Maryanto-pedagang, Suyamto-kuliner, Sutarno-harwat, Misbachul Munir-litbang), menyerap 20+ tenaga kerja (7 parkir, 3 kebersihan, 3 event).

#### **a. Struktur Pengelola dan Pendapatan**

Pendapatan operasional mencapai Rp1,5 miliar/tahun dari wahana (bebek kayuh Rp1,91-2,85 juta/bulan), parkir (Rp6,03-7,03 juta), UMKM 40 pedagang (Rp1,56-2,14 juta iuran), dan event "Panen Raya Ikan", dengan kontribusi PADes Rp65 juta/tahun (5% otomatis ke anggaran desa). Laporan keuangan Juli 2025 catat total pemasukan Rp22,08 juta (bersih Rp18,22 juta post-pengurangan 17,5%: PADes Rp1,10 juta, infrastruktur Rp2,28 juta, sosial Rp0,55 juta) dan September Rp17,11 juta (bersih Rp14,12 juta), menghasilkan saldo akhir Rp6,02 juta (Juli) dan Rp1,43 juta. (September 2025)

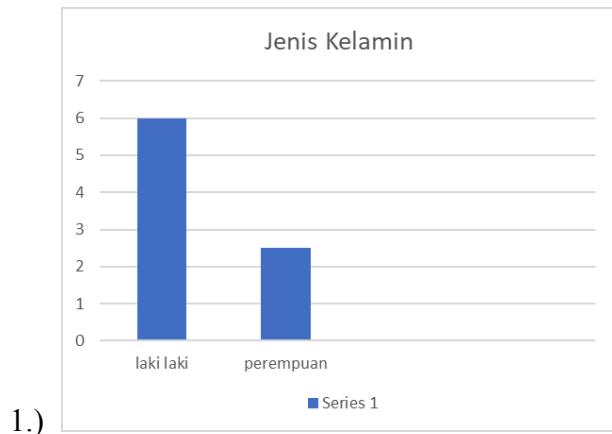
| Bulan          | Total Pemasukan (Rp) | Pengurangan PADes 5% (Rp) | Pengeluaran Total (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|----------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Juli 2025      | 22.080.200           | 1.104.000                 | 16.631.000             | 6.016.335        |
| September 2025 | 17.113.000           | 855.650                   | 14.435.500             | 1.428.105        |

Pengeluaran difokuskan insentif pengurus (Rp4-4,6 juta), operasional kebersihan/keamanan (Rp8,3-9,25 juta), dan infrastruktur (Rp2,14-2,78 juta untuk mushola, listrik, pipa).

#### **b. Implikasi Keuangan Publik**

Model ini selaras Permendes No. 4/2015 tentang BUMDes dan UU No.23/2014 otonomi daerah, dengan sumber dana 70% mandiri (PADes) dan 30% publik (APBD DIY/Bantul, Dana Keistimewaan, Kemendes kios, Dinas Pariwisata via DPRD), akuntabilitas via laporan bulanan ke BUMDes dan pengawasan Inspektorat Bantul. Dampak multidisiplin mencakup ekonomi (multiplier PDRB Bantul via UMKM, resiliensi fiskal desa), sosial (pemberdayaan 40+ pedagang), dan lingkungan (ketahanan air kemarau tanpa polusi/PDAM). Kelemahan minim HTM dan hibah pusat mendorong kemandirian, dengan rekomendasi e-ticketing/CSR untuk replikasi 100+ embung DIY, potensi tingkatkan PADes 10-15% guna optimalisasi Dana Keistimewaan. Temuan orisinal ini berkontribusi pada studi desa wisata berkelanjutan dalam keuangan negara.

### c. Dampak Investasi terhadap UMKM di Sekitar Embung

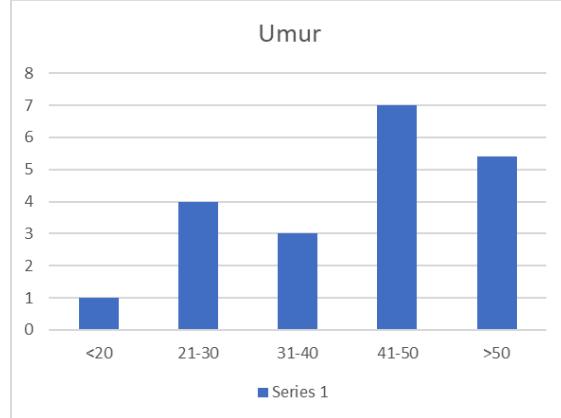


1.)

#### Distribusi Jenis Kelamin

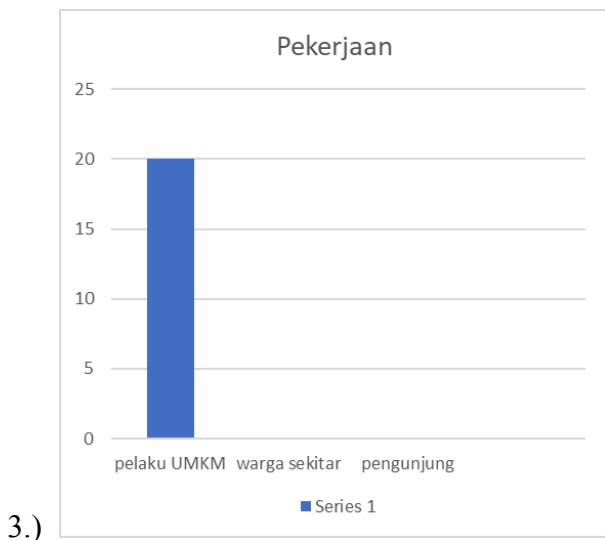
Diagram batang menampilkan dominasi responden perempuan dengan 14 orang (70%), sementara laki-laki hanya 6 orang (30%). Pola ini mencerminkan mayoritas pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah perempuan.

2.)



#### Distribusi Usia Responden

Kelompok usia 41-50 tahun dan >50 tahun masing-masing memiliki frekuensi tertinggi dengan 7 dan 5 responden, diikuti 21-30 tahun (4 responden), 31-40 tahun (3 responden), serta <20 tahun (1 responden). Responden cenderung berusia matang, yang relevan dengan pengalaman dalam UMKM



### Distribusi Usia Responden

Kelompok usia 41-50 tahun dan >50 tahun masing-masing memiliki frekuensi tertinggi dengan 7 dan 5 responden, diikuti 21-30 tahun (4 responden), 31-40 tahun (3 responden), serta <20 tahun (1 responden). Responden cenderung berusia matang, yang relevan dengan pengalaman dalam UMKM



Dampak Pendapatan Masyarakat, diagram batang menyoroti tiga kategori positif setara: Cukup berdampak (7 responden), Berdampak (7 responden), dan Sangat berdampak (6 responden), tanpa indikasi dampak negatif.

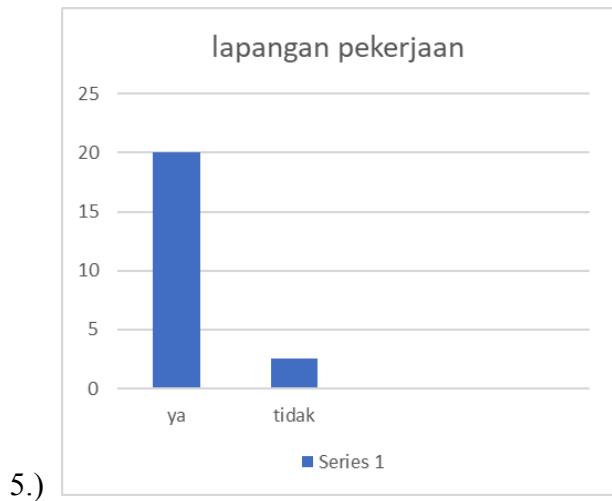


Diagram batang mengilustrasikan kategori Ya dengan 20 responden (100%), tanpa frekuensi pada Tidak, yang secara empiris menegaskan persepsi bulat bahwa UMKM di Embung Potorono membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

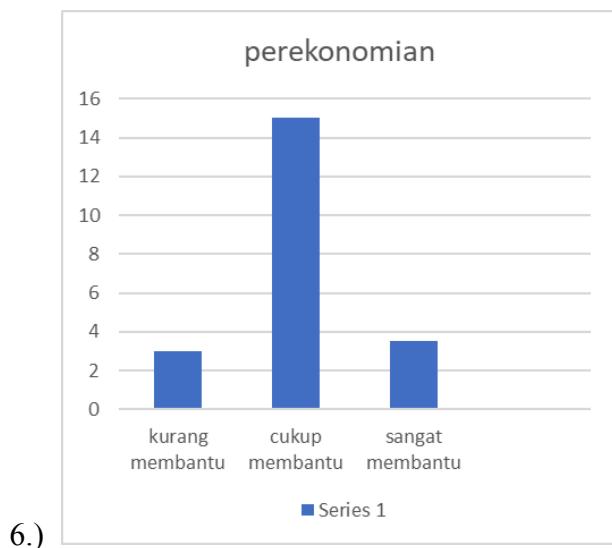


Diagram Bantuan Perekonomian Keluarga didominasi oleh kategori cukup membantu (15 responden), diikuti kurang membantu (3 responden) dan sangat membantu (2 responden).

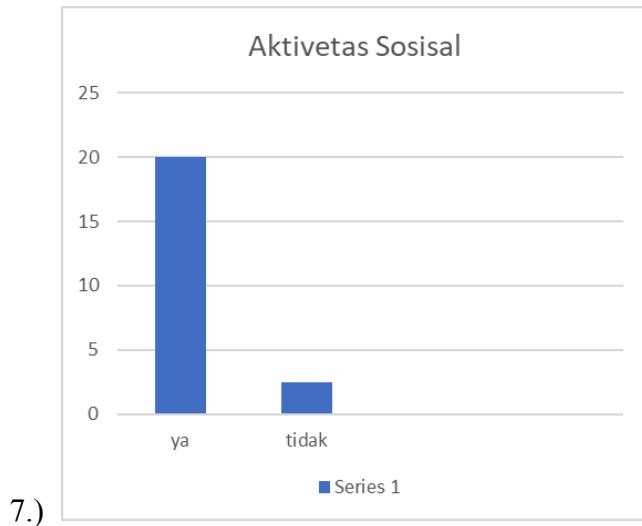


Diagram batang mengilustrasikan kategori Ya dengan 20 responden (100%), tanpa frekuensi pada Tidak, yang secara empiris menegaskan persepsi bulat bahwa keberadaan UMKM meningkatkan aktivitas sosial masyarakat di sekitar Embung Potorono.

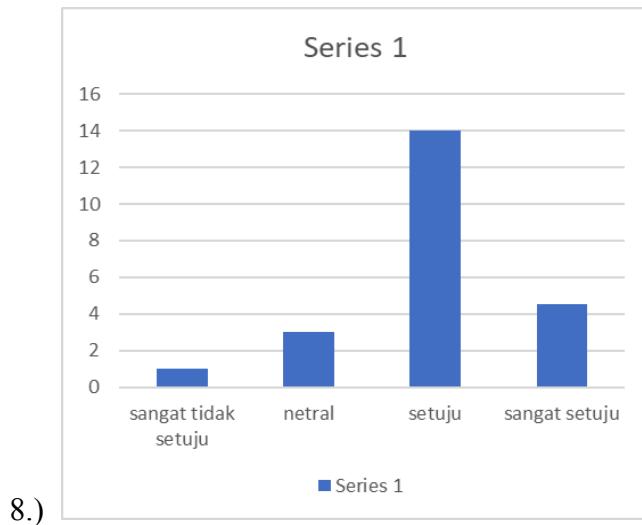


Diagram batang tentang keramaian dan kunjungan, batang Setuju mencapai 14 responden sebagai tertinggi, diikuti Netral (3 responden), Sangat setuju (2 responden), dan Sangat tidak setuju (1 responden).

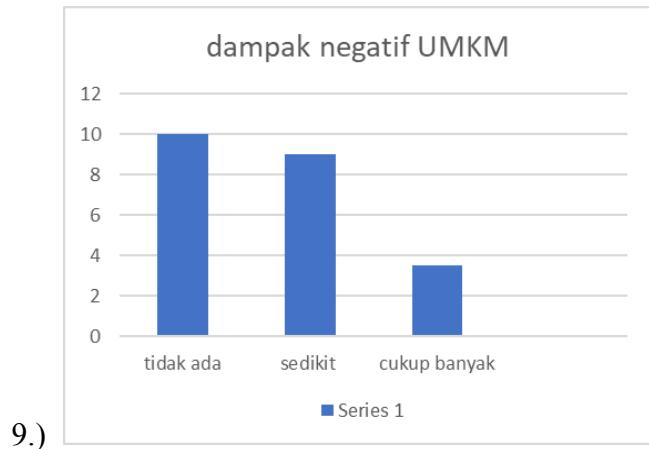
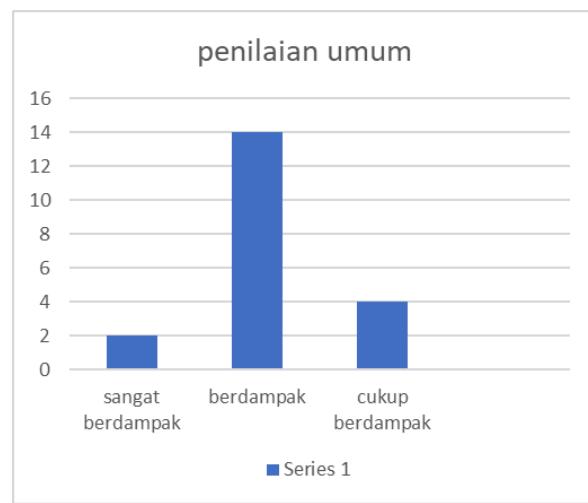
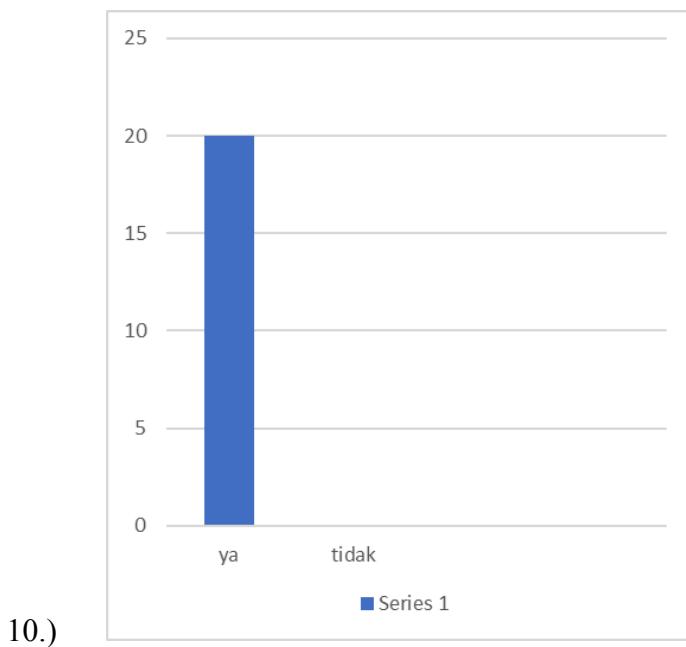


Diagram Dampak Negatif UMKM mengilustrasikan Tidak ada dampak (10 responden) dan Sedikit (9 responden) sebagai kategori dominan, cukup banyak hanya 2 responden.

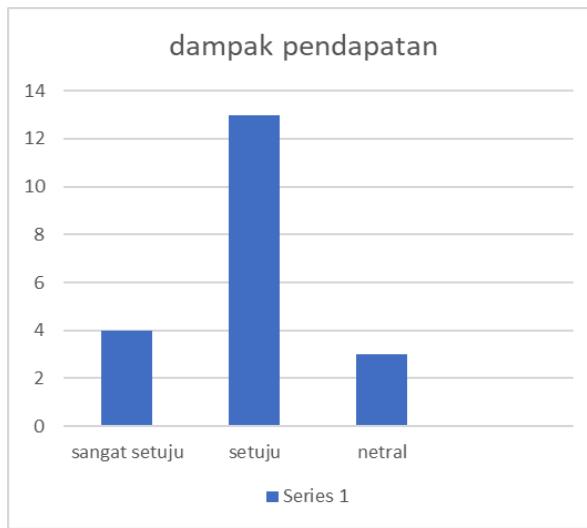


Dampak Keseluruhan UMKM (Pertanyaan 10) menunjukkan Berdampak (14 responden) paling menonjol, diikuti Cukup berdampak (4 responden) dan Sangat berdampak (2 responden).



10.)

Diagram batang menampilkan Ya mencapai 20 responden secara keseluruhan, tanpa responden yang memilih Tidak, mencerminkan dukungan penuh dari pelaku UMKM untuk pengembangan lebih lanjut di kawasan tersebut.



11.)

Untuk Dampak Pendapatan Usaha (Pertanyaan 12), Setuju (13 responden) dan Sangat setuju (4 responden) jauh mengungguli Netral (3 responden).

12.)

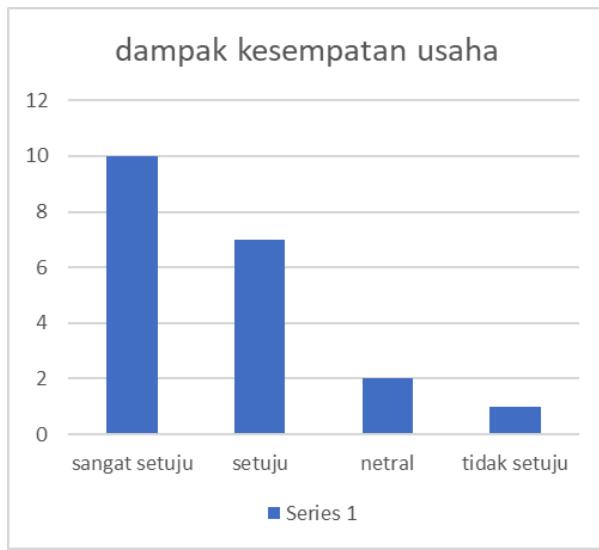
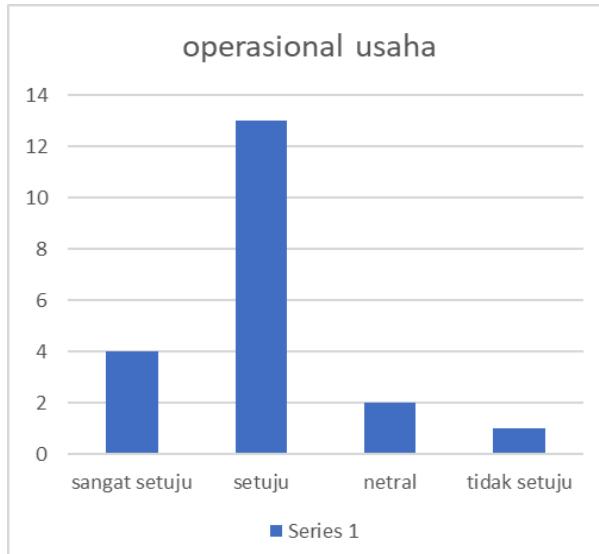


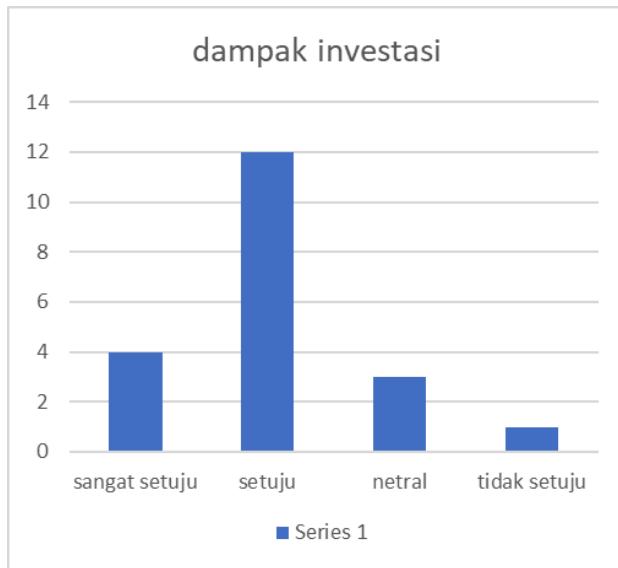
Diagram Kesempatan Kerja memiliki Sangat setuju (10 responden) tertinggi, Setuju (7 responden), Netral (2 responden), dan Tidak setuju (1 responden).

13.)



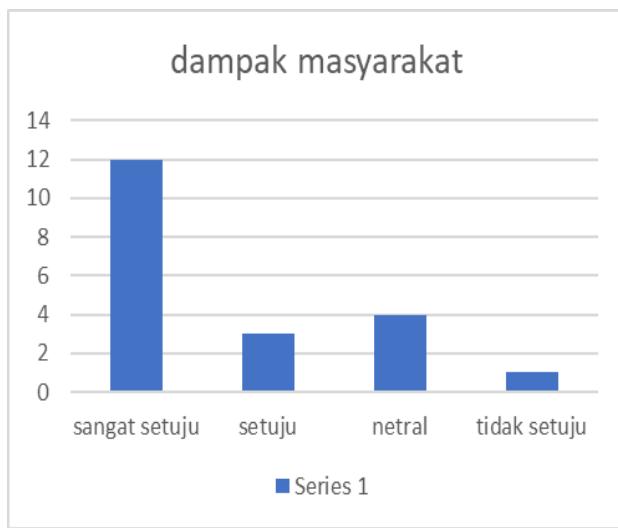
Fasilitas Operasional Usaha didominasi Setuju (13 responden) dan Sangat setuju (4 responden), dengan Netral (2 responden) serta Tidak setuju (1 responden).

14.)



Dampak Investasi Pemerintah menampilkan Setuju (12 responden), Sangat setuju (4 responden), Netral (3 responden), dan Tidak setuju (1 responden).

15.)



Peningkatan Pendapatan Keluarga dengan Sangat setuju (12 responden) paling tinggi, diikuti Netral (4 responden), Setuju (3 responden), dan Tidak setuju (1 responden).

16.)

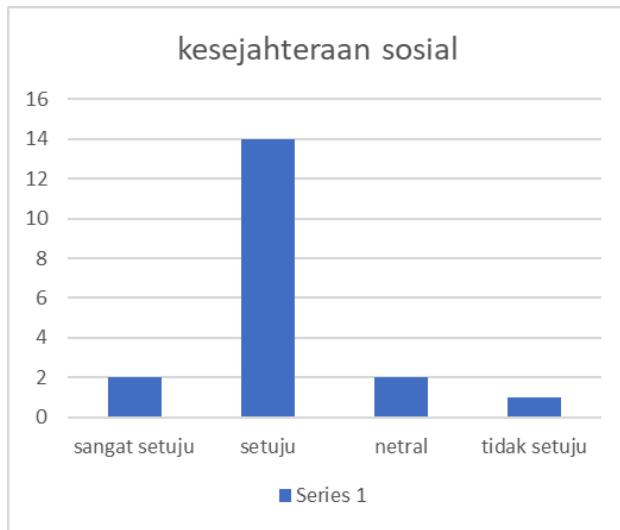
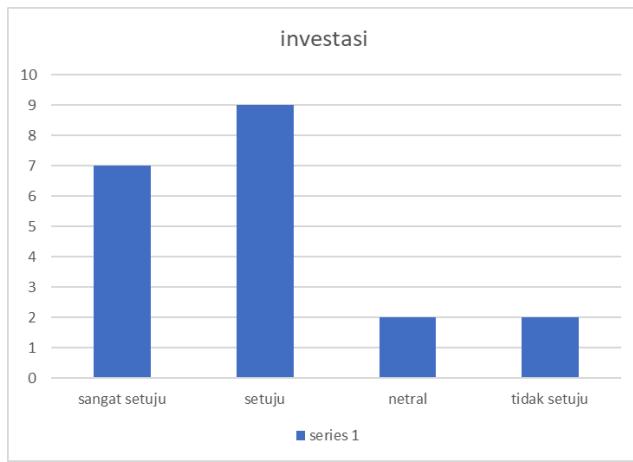


Diagram Kesejahteraan Sosial menekankan Setuju (14 responden), Netral (2 responden), Tidak setuju (1 responden), serta Sangat tidak setuju (1 responden).

17.)



Investasi Tepat Pembangunan menggambarkan Setuju (9 responden) dan Sangat setuju (7 responden) sebagai mayoritas, dengan Netral dan Tidak setuju masing-masing 2 responden.

#### d. Tantangan dan Keberlanjutan Pengelolaan

- **Kendala pendanaan**

Kendala utama dalam pengelolaan Embung Potorono adalah keterbatasan pendanaan. Pengelolaan embung sebagian besar dilakukan secara mandiri, dengan mengandalkan sumber dana internal yang berasal dari retribusi pengunjung asli,

kontribusi pelaku usaha UMKM. Kondisi ini menyebabkan anggaran pengelolaan relatif minim dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan fasilitas. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada beberapa aspek, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan wisata, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai upaya mengatasi kendala pendanaan, pengelolaan Embung Potorono biasanya menyelenggarakan berbagai kegiatan atau event sebagai strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Event-event tersebut, seperti hiburan masyarakat, atau acara tematik, diharapkan mampu menarik lebih banyak pengunjung sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di sekitar Embung. Meskipun demikian, pelaksanaan event masih bersifat isidental dan sangat bergantung pada kemampuan swadaya serta partisipasi masyarakat. sehingga kontribusinya terhadap pendanaan jangka panjang masih terbatas.

- **Tantangan operasional**

Dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, Embung Potorono menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Karena hingga saat ini, pengelola belum menerapkan Harga Tiket Masuk ( HTM )bagi pengunjung, sehingga tidak terdapat pemasukan tetap yang dapat digunakan untuk mendukung biaya operasional maupun perawatan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan fasilitas, pemeliharaan lingkungan, dan perbaikan sarana prasarana sangat bergantung pada dana swadaya serta bantuan yang bersifat tidak rutin. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaborasi dengan pihak eksternal, baik dengan dinas terkait maupun lembaga keuangan, yang dapat diajak bekerja sama dalam bentuk dukungan pendanaan, program bantuan, maupun kemitraan pengelolaan. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas operasional Embung Potorono, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan, tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan Embung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah daerah dalam pembangunan Embung Potorono memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Keberadaan embung tidak hanya berfungsi sebagai sarana konservasi sumber daya air, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi desa melalui peningkatan aktivitas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan bertambahnya pendapatan masyarakat. Pengelolaan Embung Potorono yang melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan dana publik dalam kerangka keuangan negara dapat dikelola secara efektif dan akuntabel untuk menghasilkan manfaat ekonomi lokal serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Meskipun demikian, pengelolaan embung masih menghadapi keterbatasan pendanaan berkelanjutan karena belum adanya sumber penerimaan tetap, sehingga diperlukan penguatan tata kelola keuangan, inovasi pendanaan, dan dukungan kebijakan agar investasi pemerintah dapat memberikan

manfaat yang berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara di tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R., & Muslim, I. (2024). Pengaruh wisata embung terhadap pendapatan masyarakat dengan lapangan kerja sebagai variabel mediasi di Kenagarian Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Economic Development*, 2(2).
- Abimanyu, A. A., & Anna, A. N. (2024). Analisis Keberadaan Embung Doho Di Desa Doho Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Terhadap Aspek Perubahan Penggunaan Lahan, Aspek Sosial Dan Aspek Ekonomi Tahun 2019 Dan Tahun 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/128916>
- Al-Qadhri, F. M., Hidayah, A., Ningsih, N. S., & Abdullah, Z. (2025). Peran strategis POKDARWIS dalam pengembangan wisata Embung Banyu Langit di Desa Suka Maju. *Sosiohumaniora*, 11(2), 474–491. <https://doi.org/10.30738/sosio.v11i2.19949>
- Apriliani, A. N. (2021). Pengembangan wisata embung gunung panggung terintegrasi desa budaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tambakromo. *Jurnal ABDI (Sosial, Budaya Dan Sains)*, 3(1), 1-13.
- Azlan, A. (2024). Peran pemerintah desa dalam penyediaan kebutuhan air bersih di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Skripsi Sarjana). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/77978>
- Fahmi Maulana Ikhsan. (2024). *Collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata Embung Potorono di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* [Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/3079/1/FAHMI%20MAULANA%20IKHSAN.pdf>
- Hanifah, W., Hasan, Z., & Al-Fath, R. (2025). Sinergi Perencanaan Kawasan Integrated Green City dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bareuh, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(02), 117-130. [https://www.semanticscholar.org/paper/Sinergi-Perencanaan-Kawasan-Integrated-Green-City-Hanifah-Hasan/75f00cc88f5d2216e31803e479c6f231a469830e#citing-papers?utm\\_source=direct\\_link](https://www.semanticscholar.org/paper/Sinergi-Perencanaan-Kawasan-Integrated-Green-City-Hanifah-Hasan/75f00cc88f5d2216e31803e479c6f231a469830e#citing-papers?utm_source=direct_link)
- Ikhsan, F. M. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono di Kelurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3896>

- Istiqomawati, R., Quraisy, M., & Wihasto, H. (2023). Pendampingan desa dalam optimalisasi pengelolaan embung menjadi destinasi wisata di Desa Giriasih, Purwosari, Gunung Kidul. IBSE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 19–25. <https://doi.org/10.62708/ibsejpm.v2i1.36>
- Jenahu, G. R., Aulia, N. A. S., & Pakabu, D. N. (2023). Konservasi dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional SEMSINA 2023: Sinergitas Era Digital 5.0 dalam Pembangunan, ITN Malang. <https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113>
- Karina, R., Ruspianda, R., & Afrizal, R. (2025). Dampak objek wisata Embung Telaga Dapur Umum terhadap pendapatan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat. Jurnal Planologi dan Sipil (JPS), 7(2). <https://doi.org/10.36378/jps.v7i2.4653>
- Lastiantoro, Y., & Cahyono, S. A. (2023). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Embung Bowong di Tlogosari, Giritontro, Wonogiri. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(2), 431-443. <https://doi.org/10.14710/jil.21.2.431-443>
- Nawangsih, V. S. A., Busthomi, A. N., & Khoirunnafiyah, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan instalasi air bersih untuk masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(7), 2939–2945. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i7.4285>
- Widiastuti, H., Yunianto, A., & Rahmawati, E. (2022). Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 5(2), 131–143. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.13485>
- Wikipedia. (n.d.). *Embung Potorono*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Embung\\_Potorono](https://id.wikipedia.org/wiki/Embung_Potorono)